

Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Masyarakat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Nur Farhaty¹ Sri Wahyuli² Sri Asmiatiningsih³ Surip⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nurfarhatybima11@gmail.com¹ sriwstisip78@gmail.com² sriasmia@yahoo.com³
Surip@stisipbima.ac.id⁴

Abstrak

Untuk mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu walaupun itu hanya sedikit. Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah seperti program pengembangan kawasan terpadu, proyek peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang dan aneka upaya lainnya, meskipun program tersebut dilaksanakan dan telah menurunkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan tapi kesenjangan tersebut bisa diatasi sepenuhnya dan bahkan kesenjangan tersebut masih melebar dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antar kelas sosial baik dalam ketidakmerataan pembagian hasil tambang, dari segi pendidikan, pekerjaan maupun usaha. Untuk mengatasi hal demikian pemerintah mengambil suatu bentuk kebijaksanaan dan program khusus yang berorientasi pada penduduk miskin dan penanggulangan pengangguran yaitu berupa program penanganan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi melalui bantuan pemberian beras. Program pangan ini adalah bermaksud untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini dilakukan melalui penyaluran pemberian beras yang mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Pembangunan, Ekonomi, Masyarakat Desa.

Abstrack

To lift the population from the cycle of poverty requires policies, commitments, organizations and programs as well as the right approach. More than that, it is also necessary to have an attitude that does not embarrass the poor only as objects, but as subjects. A poor person is not a person who has nothing, but a person who has something even if it is only a little. Various efforts to overcome poverty have been carried out by the government such as integrated area development programs, projects to increase the income of farmers, fishermen, traders and various other efforts. still widening in Indonesian society, this is due to the gap between social classes both in the unequal distribution of mining products, in terms of education, work and business. To overcome this, the government took a form of policy and a special program that was oriented towards the poor and overcoming unemployment, namely in the form of a program to overcome the impact of the economic crisis through the provision of rice. This food program is intended to overcome the impact of the economic crisis by distributing rice that supports economic activities for rural communities.

Keywords: Development, Economy, Village Community



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Usaha pembangunan adalah merupakan tindakan manusia yang mengarah pada kemajuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang merupakan tanggung jawab dari seluruh warga Negara Indonesia. Usaha ini mempunyai arti bahwa pembangunan itu memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat sebagai usaha merealisasikan cita-cita dan

tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, karna hal tersebut langsung menyentuh kepentingan dan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah pedesaan dengan sasaran utamanya adalah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sendiri.

Kebijakan pemerintah dalam rangka menyebarkan dan pemeratakan pembangunan sampai ke desa-desa yang sifatnya perangsang untuk melaksanakan pembangunan desa, maka pemerintah memberikan bantuan kepada desa berupa subsidi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut lebih dikenal dengan sebutan bantuan pembangunan desa. Pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang harus ditingkatkan harkat dan martabatnya yang maju dan mandiri. Menurut menteri dalam negeri, (1994 : 3) mengatakan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat dirubah yang tercermin di dalam lemahnya kemajuan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Dunn, kebijakan publik adalah sebuah *list* pilihan tindakan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat Pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan sebuah pembangunan perkotaan. Adapun pengertian tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbaki (Ekowati, 2009:1) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengikat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Mengacu pada pengertian diatas eksistensi masyarakat dalam setiap kebijakan Pemerintah tentunya didahului oleh keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan Pemerintah sebagai legitimator dalam sebuah proses kebijakan publik.

Apabila kondisi tersebut di atas dari pola hubungan sebab akibat, orang miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidak berdayaan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktifitas. Emil Salim berpendapat bahwa "Mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain" (Emil Salim, 1982:41). Demikian juga halnya dengan "*means to live comfortably*" (Tjiptoheriyanto, 1996:109). Kemiskinan kemudian didefinisikan lebih luas dari sekedar miskin pendapatan. Menurut Reitsma dan Kleinpenning (1996) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik yang mencakup material maupun non-material. Kemiskinan ini timbul akibat munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan itu sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (atau disebut juga dengan kemiskinan struktural) (Mukhtar 2007:138)

Untuk mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi sebagai

subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu walaupun itu hanya sedikit. Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah seperti program pengembangan kawasan terpadu, proyek peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang dan aneka upaya lainnya, meskipun program tersebut dilaksanakan dan telah menurunkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan tapi kesenjangan tersebut bisa diatasi sepenuhnya dan bahkan kesenjangan tersebut masih melebar dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antar kelas sosial baik dalam ketidak merataan pembagian hasil tambang, dari segi pendidikan, pekerjaan maupun usaha.

Untuk mengatasi hal demikian pemerintah mengambil suatu bentuk kebijaksanaan dan program khusus yang berorientasi pada penduduk miskin dan penanggulangan pengangguran yaitu berupa program penanganan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi melalui bantuan pemberian beras. Program pangan ini adalah bermaksud untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini dilakukan melalui penyaluran pemberian beras yang mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang dikategorikan miskin, dengan sasaran pokok, tertampungnya keluarga miskin sehingga dapat menghidupkan rumah tangga, mengurangi kemampuan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, menambah hasil. (petunjuk pelaksanaan jarring pengaman sosial dalam mengatasi dampak krisis ekonomi).

Desa Rai Oi yang secara administratif terletak di Kecamatan Sape merupakan salah satu desa yang selama ini mendapat porsi program pengentasan kemiskinan baik secara lokal, regional maupun tingkat nasional, sebagai contoh dari tahun 2007, Desa Rai Oi mendapat program P2KP Pedesaan, program ini menekankan pada dua item kegiatan, *pertama* penyediaan infrastruktur desa dengan pola padat karya, dimana masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaannya dengan maksud masyarakat yang terkategori dalam penganggur terbuka bisa mendapatkan pendapatan melalui keikutsertaannya dalam kegiatan yang dimaksud. *Kedua*, pelaksanaan kegiatan pada aitem kedua ini lebih menekankan kepada pemberian stimulus keuangan yang dalam masyarakat dikenal dengan BLM (bantuan langsung masyarakat) yang berbentuk pinjaman lunak bagi masyarakat miskin.

Pada tahun yang hampir sama program Jamkesmas, PUAP (pengembangan usaha agribisnis perdesaan, KUR (kredit usaha rakyat), dan PKH (program keluarga harapan) digalakkan dan dikembangkan didesa ini, belum lagi program pemerintah propinsi NTB Gerbang Emas, banyaknya program yang masuk dan bergeliat didesa ini ternyata masih belum memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Pengembangan program Gerbang Emas Bangun Desa merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal (Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Edisi 2005)

Pengembangan Program Gerbang Desa bertujuan menciptakan Masyarakat yang berdaya dan mandiri, meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Program tersebut, dan mengefektifkan pencapaian sasaran serta mewujudkan berbagai program yang terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan. Desa Rai Oi umumnya memiliki infrastruktur yang rata-rata kondisinya memperhatikan, terutama terutama prasarana jalan dan lingkungan. Pada prasarana jalan, banyak jalan lingkungan yang belum diaspal, rusak, berlubang, dan tidak memiliki saluran buangan (got) yang memadai, sedangkan pada lingkungannya terlihat kumuh, banyak rumah warga miskin yang belum memiliki sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) serta sanitasi yang baik maupun memadai. Program yang

ditawarkan oleh Gerbang Emas Bangun Desa sangat tepat, ini mengingat karena kondisi di wilayah itu yang kebanyakan masih terlihat kumuh. Prasarana yang menghubungkan kampung-kampung, diprediksikan perlu mendapat perhatian untuk memperbaiki kualitas lingkungan mereka, menjadi lebih sehat dan terakses ke sumber-sumber perekonomian setempat.

Terkait dengan itu, Pengembangan program Emas Bangun Desa di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang mengedepankan strategis pemberdayaan berbasis institusi lokal, muncul sebagai salah satu alternatif penanganan kemiskinan perkotaan. Penanganan seperti itu merupakan pengalaman baru, untuk itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan Rumusan masalah Bagaimana bentuk tahapan penguatan ekonomi masyarakat desa dan Bagaimana sarana dan prasarana pendukung, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui implementasi program gerakan pembangunan ekonomi masyarakat desa dan untuk mengetahui sarana dan prasarana pendukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tahapan Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa

Masing-masing anggota KSM dapat dibantu oleh pengurus KSM, UPK, relawan atau fasilitator mengisi blanko pengajuan pinjaman anggota KSM (PB 01), dan menandatangani bersama suami/isteri. Selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada ketua KSM. Ketua KSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko pengajuan pinjaman anggota KSM (PB-01) dan menandatangani pada kolom mengetahui ketua KSM. Kemudian membuat blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman (PB-02), dilampiri: Berita acara pembentukan KSM, Aturan main KSM, Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM, Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM (PB 01) yang sudah di isi, Surat kuasa. Pengurus KSM menyerahkan blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman (PB 02) beserta lampiran kepada petugas UPK.

Dalam tahap ini petugas UPK melakukan pemeriksaan kelayakan dari KSM yang mengajukan pinjaman, dan proses sebagai berikut. Petugas UKP menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan dan keputusan pemebrian pinjaman (PB 02) beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM: Blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman (PB-02) apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar, Fotocopy berita acara pembentukan KSM dan aturan main. Blamko pengajuan pinjaman anggota KSM (PB 01) apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar. Fotocopy KTP masing-masing calon pinjaman apakah sudah ada, masih berlaku dan penduduk setempat. Untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan tahap pemeriksaan pinjaman dana bergulir dalam Pelaksanaan Program Gerbang Emas Bangun Desa di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Manajer UPK kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan keputusan dari petugas UPK. Hal-hal yang perlu diperhatikan: Kelayakan KSM sebagai sasaran Gerbang Emas perkotaan dan sebagai calon calon peminjam. Hasil analisis petugas UKP terhadap usaha anggota KSM. Usulan putusan dari petugas UKP. Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat masalah manajer UPK memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan menandatangani dalam kolom tandatangan persetujuannya. Kemudian apabila berdasar hasil

penelitian terdapat masalah / keraguan (misalnya omzet, biaya, pendapatan tidak wajar), manajer UPK memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasar hasil pemeriksaan ulang, manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. Dan apabila berdasar hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk diberikan pinjaman, manajer UPK memutuskan untuk menolak pemberian pinjaman. Berkas permohonan pinjaman yang telah diputus kemudian diserahkan kembali kepada petugas UPK untuk diselesaikan secara lanjut.

Setelah proses putusan pinjaman disetujui, tahap selanjutnya adalah realisasi pinjaman, dengan mempertimbangkan hal-hak sebagai berikut. Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus manajer UPK, petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan ansurannya. Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman: Surat perjanjian pinjaman (PB 03) materai Rp 6.000,- (1 set), Bukti kas keluar UPK (model 1 B) sebagai tanda penerimaan uang (rangkap 3), Kartu pinjaman KSM (UPK 04A dan UPK 04B), Sebelum anggota dan ketua KSM menandatangani dokumen tersebut, petugas pinjaman UPK wajib Menjelaskan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, bunga serta cara pengembalin/mengangsurnya. Juga dijelaskan mengenai pinjaman bergulir yang wajib dibayar kembali karena bukan hiba serta kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau Bank lain untuk tanggung renteng tersebut. Hanya peminjam yang mengembalikannya dan memiliki tabungan sesuai dengan ketentuan yang akan mendapat fasilitas pinjaman berikutnya. Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta menandatangani dokumen surat perjanjian pinjaman (PB 03) dan bukti kas keluar UPK (model 1 B). Petugas UPK menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM beserta anggotanya tersebut kepada manajer UPK untuk meminta persetujuan realisasi.

Manajer UPK meneliti pengisian surat perjanjian pinjaman (PB 03) beserta lampirannya dan bukti kas keluar UPK (model 1B). keduanya dicocokkan, selanjutnya persetujuan dengan menandatangani pada kolom tandatangan dibukti kas keluar UPK (model 1B), dan menyerahkan berkas tersebut kepada pembuku. Pembuku memeriksa pengisian surat perjanjian pinjaman (PB 03) dan bukti kas keluar UPK (model 1B). apabila terdapat masalah, di cacat dalam buku kas harian UPK (UPK 01), catatan uang keluar (UPK 03), kartu pinjaman KSM (UPK 04), registrasi sisa pinjaman (UPK 11) dan menyerahkan bukti kas keluar UPK (model 1B) kepada kasir untuk dibayar. Berkas pinjaman lainnya diadministrasikan. Kasir memanggil KSM beserta anggotanya, menjelaskan kembali besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk jasa, jangka waktu, angsuran dan tanggung renteng. Setelah KSM memahami penjelasan, kasir meminta KSM menandatangani bagian belakang Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) sebagai tanda penerimaan uang. Kemudian kasir membubuhkan tanda tangan pada kolom jasis di bukti kas keluar UPK (Model 1B). bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) asli sementara disimpan kasir sebagai bukti kas. Pada akhir hari diserahkan kepada pembuku sebagai bukti pembukuan. Lembaran ketiga lainnya dimasukkan kedalam berkas pinjaman. Petugas UPK meneliti kelengkapan isi berkas pinjaman (copy bukti kas keluar/model 1B, surat perjanjian pinjaman/PB 03, blanko putusan manajer UPK/PB 02, blanko pemeriksaan analisis, petugas UPK, dan permohonan pinjaman /PB 02 ; pengajuan pinjaman anggota KSM/PB 01 copy KTP dan BA pembentukan KSM serta aturan main KSM), kemudian menyimpan serta berurutan berdasarkan nomor rekening pinjaman. Nomor yang paling kecil berada bagian paling bawah.

Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan penggunaan pinjaman dan untuk mengingatkan peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka

petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 bulan setelah realisasi peminjam: Kunjungan ketempat usaha peminjam, dengan tujuan: Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak. Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau menurun. Melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai permohonan atau penyimpang. Membantu mencari jalan keluar apabila terjadi masalah dengan usaha peminjam. Kunjungan kerumah peminjam, dengan tujuan: Melihat kepastian domisilin peminjam, Melihat keadaan kesejahteraan peminjam, Membantu mencari jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran peminjam, Dengan kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam dibulan pertama setelah realisasi, maka akan lebih awal terdeteksi apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat masalah pada peminjam.

Dalam tahap ini, keberhasilan dari program dana bergulir ditentukan oleh aktif-tidaknya anggota KSM mengembalikan pinjaman yang telah diterima, sebagai dasar pembahasan akan ditampilkan tahapan pembayaran pinjaman, sebagai berikut. Menjelang 1 atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran peminjam, anggota KSM menyerahkan uang angsuran dan jasa pinjaman kepada ketua KSM untuk disetorkan ke UPK. Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan angsuran pinjamannya, agar segera memenuhi kewajibannya, Angsuran pinjaman (poko dan jasa) serta tabungan yang terkumpul, disetor oleh pengurus KSM kepada UPK dengan membawa kartu pinjaman KSM (UPK 04) dan kartu tabungan (UPK 12), Kasir menghitung jumlah setoran dari KSM. Apabila jumlahnya sesuai, kasir membuat bukti kas masuk UPK (model 1A), selanjutnya pembuku mencatat penerima setoran dari KSM dalam buku kas harian UPK (UPK 01), ketua Pinjaman KSM (UPK 12A dan 12B) registrasi tabungan (UPK 13) dan buku registrasi pinjaman KSM (UPK 11). UOK menyerahkan kembali kartu Pinjaman KSM (UPK 04) kartu tabungan KSM (UPK 12) milik KSM yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas UPK kepada penyeter (pengurus KSM) Pengurus KSM pada kesempatan pertama memberitahukan transaksi penyeteroran pinjaman dan tabungan tersebut kepada anggotanya. Tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar akntor LKM/UPK dan diluar jam kerja. Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayaran angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lai wajib mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terelebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung renteng.

Pembahasan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Survey lokasi sasaran untuk memilih lokasi sasaran Perencanaan sebagai landasan atau pedoman pokok dari semua fungsi manajemen. Dalam kegiatan perencanaan dilakukan pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan untuk waktu yang akan datang bagi setiap Unit yang ada dalam organisasi secara keseluruhan. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen, dengan demikian perencanaan merupakan syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. Untuk membuat satu perencanaan yang baik harus dipikirkan secara matang sebelum tindakan-tindakan dilakukan. Guna mewujudkan suatu rencana yang telah ditetapkan, harus direalisasikan melalui kegiatan pelaksanaan. Pelaksanaan dapat pula dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan merupakan roda unsur dinamis dari manajemen dan menjadi roda pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pelaksanaan sangat erat kaitanya dengan fungsi-fungsi manajemen lain; yaitu perencanaan,

pengorganisasian, dan pengawasan. Pelaksanaan atau implementasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam merealisasikan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan dalam hal ini penulis sejajarkan dengan pengertian penggerakan yaitu tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu organisasi dapat. Program Gerbang Emas Bangun Desa diawali dengan pembentukan tim pelaksana. Perencanaan yang baik memungkinkan untuk dapat memilih tindakan-tindakan yang paling baik dari banyak tindakan yang ada. Maka dapat diharapkan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan sedikit kemungkinannya mengalami kekeliruan, yang dapat menimbulkan pengorbanan yang lebih besar atau tidak tercapainya tujuan yang ditetapkan tidak berhasil guna dan berdaya guna.

Sekalipun waktu yang akan datang jarang dapat diperkirakan secara tepat terutama faktor-faktor diluar jangkauannya, tetapi dengan proses intelektual perencanaan diharapkan akan dapat mendekati kebenaran. Dari pengertian dan pendapat tentang perencanaan yang dipaparkan di atas, jelas bahwa perencanaan dianggap sebagai proses, fungsi dan sebagai keputusan perencanaan sebagai proses karena perencanaan adalah suatu tindakan pemilihan yang terbaik dan menguntungkan dari beberapa alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen, dimana pimpinan melakukan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan kewenangannya. Perencanaan sebagai keputusan ialah untuk kejelasan apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan.

KESIMPULAN

Masing-masing anggota KSM dapat dibantu oleh pengurus KSM, UPK, relawan atau fasilitator mengisi blanko pengajuan pinjaman anggota KSM (PB 01), dan menandatangani bersama suami/isteri. Selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada ketua KSM Dalam tahap ini petugas UPK melakukan pemeriksaan kelayakan dari KSM yang mengajukan pinjaman, dan proses sebagai berikut. Petugas UKP menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman (PB 02) beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM. semua stakeholder yang konsen dengan persoalan pengentasan kemiskinan agar nantinya setelah adanya program dana bergulir untuk ditindak lanjuti menjadi program penguataan kelembagaan ekonomi dan kemudahan memperoleh akses pendanaan ekonomi mikro. Program penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pedesaan pada program Gerbang Emas yang telah ada yang berorientasi pada proyek padat karya, agar kiranya kedepannya digalakkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2002, *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan*, Bappenas, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri RI, 1994, *Masalah Kemiskinan dan Penanggulangannya*, Jakarta.
- Buku Pedoman Satlak, 2007, *Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa (Gerbang-Emas Bangun Desa)* Propinsi NTB.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2004, *Suplemen penyempurnaan Pedoman Umum P2KP*, Departemen Kimpraswil, Jakarta.
- Dunn William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya
- Muchtar, 2007, *Strategis Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP Di Desa Suka Danau*, Puslit PKS Balatbangsos, Jakarta

- Keppres Nomor 80 tahun 2003, *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Persiden Republik Indonesia*, Jakarta.
- Keppres Nomor 32 tahun 2005, *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Persiden Republik Indonesia*, Jakarta.
- Rotter, J.B. (1966), "Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement", *Psychological Monographs*, Vol. 80, pp. 1-28.